

Pengukuran Kesejahteraan Daerah Berbasis Index Maqashid Di Aceh, Bengkulu Dan Sumatera Barat

Dian Aprianingsih

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: dianaprianingsih2900@gmail.com

Abstract. *The Islamic Human Development Index in this research is used to measure regional welfare based on Maqashid Syariah. I-HDI measures regional welfare which includes material welfare and non-material welfare with five Maqashid Syariah protections, namely religious protection (ad-Dien), soul protection (an-Nafs), reason protection (al-'Aql), offspring protection (an -Nasl) and protection of assets (al-ma'al). This research uses quantitative research. This research was conducted in three different provinces, namely Aceh Province, Bengkulu Province and West Sumatra Province. The aim of this research is to analyze the human development achievement index in Aceh Province, Bengkulu Province and West Sumatra Province using the I-HDI calculation method. The research results show that the provinces of Aceh, Bengkulu and West Sumatra are categorized as having low I-HDI development status through I-HDI calculations.*

Keywords: *Economic Development, Maqashid Syariah, Welfare, Islamic Human Development Index*

Abstrak. *Islamic Human Development Index dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan daerah berdasarkan Maqashid Syariah. I-HDI mengukur kesejahteraan daerah yang mencakup kesejahteraan material maupun kesejahteraan non material dengan lima perlindungan Maqashid Syariah, yaitu perlindungan agama (ad-Dien), perlindungan jiwa (an-Nafs), perlindungan akal (al-'Aql), perlindungan keturunan (an-Nasl) dan perlindungan harta (al-ma'al). Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada tiga provinsi yang berbeda yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis index pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan dengan metode perhitungan I-HDI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat dikategorikan kedalam status pembangunan I-HDI yang rendah melalui perhitungan I-HDI.*

Kata kunci: *Pembangunan Ekonomi, Maqashid Syariah, Kesejahteraan, Islamic Human Development Index*

LATAR BELAKANG

Sebelum tahun 1970, pembangunan semata-mata dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi saja. Perhatian dunia tertuju pada diskusi tentang pendapatan, modal, pertumbuhan ekonomi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, disadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin adanya perbaikan taraf hidup sebagian besar penduduk. Data empiris menunjukkan bahwa beberapa negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih menghadapi masalah pengangguran, kemiskinan dan masalah sosial lain yang berhubungan dengan manusia.

Secara perlahan, konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pembangunan yang hanya terfokus pada ekonomi saja. Konsep pembangunan manusia tidak hanya memperhitungkan aspek pendapatan, tetapi juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan yang berjudul Human Development Report (HDR). Dalam laporannya UNDP menjelaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan hanya input dari pembangunan. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, 1990).

Kesejahteraan merupakan diskursus yang banyak dikaji dan menjadi perhatian utama bagi seluruh negara didunia bahkan lembaga internasional pun berlomba-lomba menetapkan suatu ukuran tertentu untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Salah satunya PBB dengan UNDP yang merumuskan ukuran kesejahteraan masyarakat atau yang disebut dengan Human Development Index (HDI). Indikator-indikator kesejahteraan yang terdapat dalam indeks ini diantaranya yaitu pendapatan perkapita, panjangnya masa hidup dan tingkat Pendidikan yang diraih. Konsep yang ditawarkan UNDP dalam mengukur tingkat pembangunan manusia dengan menggunakan HDI masih menjadi indikator yang paling komprehensif karena memuat tiga komponen penting sebuah pembangunan manusia yang mencakup pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak.

Akan tetapi, ketiga komponen tersebut tidak sepenuhnya kompetibel dan cukup untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif islam. Arah teori dan konsep yang mendasari dalam membangun HDI tidak didasarkan pada Maqashid Syariah. Oleh karena itu, untuk mengukur tingkat pembangunan manusia dinegara yang mayoritas penduduknya

beragama islam akan lebih tepat jika dilakukan dengan menggunakan Islamic Human Development Index (I-HDI), dimana teori dan konsepnya berdasarkan pada perspektif islam.

Tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif islam adalah untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh dan holistik baik didunia maupun diakhirat. Untuk mengukur pembangunan ekonomi dalam perspektif islam menggunakan I-HDI (Islamic Human Development Index). I-HDI ini dianggap dalam kerangka maqashid syariah yang pada dasarnya berkaitan dengan promosi kesejahteraan melalui pelestarian diri, kekayaan, keturunan, akal dan iman. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perbaikan berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. Indikator tercapainya pembangunan adalah pendapatan yang tinggi dan merata, tersedianya lapangan kerja, meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, berkembangnya teknologi dan sebagainya.

Angka pembangunan manusia berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. UNDP menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia disuatu provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) berdasarkan skala 0,0-100, yaitu: a) Tinggi: lebih dari 80,0 b) Menengah atas antara 66,0-79,9 c) menengah bawah antara 50,0-65,9 d) Rendah: HDI kurang dari 50,0. Dalam penelitian kali ini, peneliti mengambil objek penelitian berupa daerah yang memiliki tingkat religious yang cukup tinggi dan memiliki nilai IPM yang cukup baik yang ada disumatera yaitu Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat. Data yang diperoleh berdasarkan dari olahan data BPS. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran per kapita / tahun	IPM
2016	69,51	13,89	8,86	8.768.000	70,00
2017	69,52	14,13	8,98	8.957.000	70,60
2018	69,64	14,27	9,09	9.186.000	71,19
2019	69,87	14,30	9,18	9.603.000	71,90
2020	69,93	14,31	9,33	9.462.000	71,99

Sumber : BPS (Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh 2020)

Berdasarkan hasil data diatas, pembangunan manusia di Provinsi Aceh tiap tahunnya mengalami kenaikan. Dilihat dari angka indeks pembangunan manusia yang terus bertambah dari tahun 2016-2020. Terlihat pada tahun 2018 nilai IPM mengalami peningkatan sebesar

0,59 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan yang terjadi secara nyata, juga dapat meningkatkan kualitas manusia di Aceh baik dari segi Kesehatan, Pendidikan maupun Ekonomi. Pergerakan yang terjadi pada indeks pembangunan manusia secara tidak langsung dapat berdampak pada keberhasilan pencapaian pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM-nya maka akan semakin cepat nilai IPM ideal yang akan dicapai.

Tabel 1.2

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran per kapita/ tahun	IPM
2016	68,56	13,38	8,37	9.492.000	69,33
2017	68,59	13,57	8,47	9.778.000	69,95
2018	68,84	13,58	8,61	10.162.000	70,64
2019	69,23	13,59	8,73	10.409.000	71,21
2020	69,35	13,61	8,84	10.380.000	71,40

Sumber : BPS (Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu 2020)

Berdasarkan hasil perolehan data diatas, dapat peroleh bahwa pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Terlihat dari IPM Provinsi Bengkulu mencapai 71,40 pada tahun 2020. Angka tersebut meningkat sebesar 0,19 poin atau tumbuh sebesar 0,27 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan IPM, maka secara tidak langsung pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu dapat terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan hasil pencapaian yang akan diperoleh.

Tabel 1.3

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran per kapita / tahun	IPM
2016	68,73	13,79	8,59	10.126.000	70,73
2017	68,78	13,94	8,72	10.306.000	71,24
2018	69,01	13,95	8,76	10.638.000	71,73
2019	69,31	14,01	8,92	10.925.000	72,39
2020	69,47	14,02	8,99	10.733.000	72,38

Sumber : BPS (Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat 2020)

Jika dilihat dari hasil data diatas, dapat diperoleh bahwa Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 Nilai IPM-nya mencapai 72,38 persen dimana nilai tersebut mengalami penurunan sebesar

0,01 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, nilai IPM-nya mengalami peningkatan sebesar 0,56 poin dengan nilai 72,39 persen. Dengan demikian, pencapaian pembangunan di Provinsi Sumatera Barat dapat terus tumbuh seiring dengan bertambahnya nilai IPM yang dihasilkan.

IPM mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Ketiga unsur tersebut sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPM nya. Ketiga unsur tersebut tidak bisa berdiri melainkan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti ketersediaan kesempatan kerja, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi, IPM disuatu daerah ataupun provinsi akan meningkat jika ketiga unsur tersebut meningkat dan justru sebaliknya. Dan nilai IPM yang tinggi menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah atau provinsi tersebut. Adapun juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan IPM diantaranya adalah PDRB, rasio ketergantungan, konsumsi rumah tangga untuk makanan, APBD untuk pendidikan dan APBD untuk kesehatan.

Berdasarkan hasil pemaparan ketiga provinsi tersebut peneliti menghubungkan pembangunan manusia dengan maqashid syariah yang nantinya hasil akhirnya akan berorientasi terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan manusia berdasarkan pada perhitungan I-HDI.

Pengukuran I-HDI yang dibangun dari konsep maqāshid syarīah menurut Imam Asy-Syatibi bahwa kebutuhan dasar manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (dien), jiwa (nafs), intelektual (aql), keluarga dan keturunan (nasl), dan material (māl). Kelima dimensi tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, Jika salah satu dari kebutuhan dasar manusia tersebut tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.

Kesejahteraan daerah dapat tercapai dengan baik dan seimbang jika telah berhasil mencapai kesejahteraan yang optimal secara menyeluruh baik dari sisi kesejahteraan materi maupun kesejahteraan non materi (spiritual). Sehingga peneliti berharap agar masyarakat maupun pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan daerah masing-masing melalui index maqashid ini. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul yaitu “Pengukuran Kesejahteraan Berbasis Index Maqashid di Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat” dengan tujuan untuk melihat kesejahteraan daerah tersebut berdasarkan pada index maqashid.”

Oleh karena itu untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan lebih tepat jika dilakukan dengan menggunakan

Islamic Human Development Index (I-HDI), di mana teori dan konsepnya berdasarkan pada perspektif Islam.

KAJIAN TEORITIS

Pembangunan diartikan sebagai keadaan dimana terjadi peningkatan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Definisi pembangunan yang sering dijumpai ini adalah proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkat dalam jangka waktu yang lama kecuali jika jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut meningkat dan distribusi pendapatan tidak menjadi tidak merata. Sasaran pembangunan menjadi penting karena menjadi acuan untuk merumuskan indikator keberhasilan. Proses identifikasi indikator pembangunan manusia tidak lepas dari filosofi dan definisi pembangunan manusia. Ada berbagai pendekatan dan terminologi yang digunakan dalam pembangunan manusia.

Kemajuan manusia dimulai dari jalannya perputaran keuangan, yang terlihat dari berkembangnya kemampuan atau kapasitas manusia dalam melakukan berbagai macam kegiatan di mata publik. Kemudian lagi, kemajuan manusia terkait erat dengan upaya untuk memenuhi ekspektasi kenyamanan sehari-hari. Dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan tentu saja diperlukan suatu indikator dan alat ukur. Untuk menentukan tingkat hasil dari proses kemajuan manusia yang terletak pada manusia, UNDP telah mendorong indeks Peningkatan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia mempunyai tiga komponen pokok, yaitu: kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta pendapatan riil.

Gagasan kemajuan keuangan menurut pandangan Islam yang dibingkai dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang juga dikemukakan oleh para peneliti dan peneliti dalam aspek keuangan Islam tidak sama dengan gagasan perbaikan moneter yang dikemukakan oleh gagasan barat, khususnya di titik batas utama. Tujuan peningkatan keuangan dalam pandangan Islam adalah untuk mencapai kemakmuran yang lengkap dan menyeluruh baik di planet ini maupun di masa depan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, salah satu tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam adalah menciptakan keadilan distributif; Makna pencapaian tingkat pembangunan minimal adalah terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi individu masyarakat, sebagai jaminan terpeliharanya Maqâshid Syariah yang terdiri dari lima manfaat dasar yaitu rasa aman beragama, jiwa, akal, keturunan, dan harta hak setiap individu. Kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi akibat maldistribusi akan menimbulkan permasalahan ekonomi yang jauh dari makna negara sejahtera.

I-HDI merupakan instrumen untuk mengukur pembangunan manusia dari perspektif Islam. I-HDI mengukur tingkat kesejahteraan manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar agar manusia dapat hidup berumah tangga di dunia dan akhirat (mencapai Falah). Pemenuhan lima kebutuhan dasar dalam maqashid syariah akan menjadi teori landasan untuk mengembangkan Islamic Human Development Index (I-HDI) ini. Dimensi ini mengukur kinerja kesejahteraan material (MW) dan kesejahteraan non-material (NW). Pemenuhan lima kebutuhan dasar Maqashid Syariah berdasarkan pendapat Imam al-Syatibi akan menjadi landasan teoritis untuk membangun Indeks Pembangunan Manusia Islam. Kelima dimensi ini mengukur kinerja kesejahteraan material (MW) dan kesejahteraan non-material (NW). Di bawah ini adalah lima indeks berdasarkan Maqashid Syariah yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan daerah:

Lima Indikator yang Terukur

Tujuan Pembangunan	Dimensi	Indeks Dimensi
Masalah	Hifdzu ad-Dien	Index ad-Dien
	Hifdzu an-Nafs	Index an-Nafs
	Hifdzu al-'Aql	Index al-'Aql
	Hifdzu an-Nasl	Index an-Nasl
	Hifdzu al-Ma'al	Index al-Ma'al

sumber : Anto, 2009. Introduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries

Berdasarkan penelitian Anto (2009) dan Rafsanjani (2014) mengukur pembangunan manusia dengan indikator yaitu :

Adapun kategori I-HDI yang digunakan berdasarkan pada ukuran HDI yang diterbitkan oleh UNDP yaitu Kelima indeks tersebut digunakan untuk mengukur lima dimensi Maqashid Syariah, nilai kelima indeks tersebut dihitung berdasarkan indikator yang menggambarkan masing-masing dimensi Maqashid Syariah. Secara konseptual, Maqashid Syariah menegaskan tujuan Syariat Islam sebagai upaya menjaga kesejahteraan hidup manusia, dengan tujuan mendatangkan manfaat dan mencegah mudharat. Islam sebagai konsep kehidupan atau sistem kehidupan menjanjikan ketertiban, keamanan, kedamaian dan kesejahteraan bagi pemeluknya.

Islam mengatur aktivitas kehidupan secara bersahaja dengan prinsip keadilan dan keseimbangan melalui kaidah, asas dan kaidah tertentu dalam setiap detail kehidupan manusia,

bahkan dalam bidang ekonomi. Keberhasilan ekonomi Islam terletak pada tingkat keselarasan atau keseimbangan antara kebutuhan material dan kebutuhan etis umat. Jadi, ajaran Islam mirip dengan syariah yang selalu dilakukan untuk mencari nafkah. Selain itu ada juga kata syari' yang berarti jalan yang besar, dalam hal ini syariat islam adalah jalan hidup yang harus diikuti oleh setiap muslim. Untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kebinasaan di dunia dan akhirat, para ahli hukum mengkaji dan menetapkan bahwa ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima poin ini merupakan sumber Al-Qur'an dan tujuan syariah (maqashid al-syariah). Kelima pokok ini termasuk Dlaruriyat, jika tidak diikuti dalam kehidupan ini maka akan membinasakan manusia. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan Syariat Islam yang biasa disebut Maqashid Syariat, yaitu melindungi agama, keturunan, jiwa, ruh dan harta benda.

Ekonomi Islam yang merupakan bagian dari Syariat Islam tentunya memiliki tujuan yang tidak terpisahkan dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (falah) dan kehidupan yang baik dan mulia (al-hayah al-thayyibah). Falah berasal dari bahasa Arab aflahayuflihu yang artinya kesuksesan, ketenaran atau kemenangan. Secara harfiah, al-falah adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Menurut Islam, istilah Falah berasal dari kata Al-Qur'an yang sering berarti rejeki panjang, akhirat, sehingga tidak hanya memperhatikan aspek material tetapi lebih menekankan aspek spiritual. Dalam konteks global, Falah merupakan konsep multidimensi, berimplikasi pada aspek perilaku individu/mikro maupun perilaku kolektif atau makro. Bagi kehidupan di dunia, Falah mencakup tiga makna, yaitu bertahan hidup, bebas dari hawa nafsu, kekuasaan, dan kemuliaan. Adapun falah untuk akhirat, falah meliputi pengertian keselamatan abadi, kemuliaan abadi, dan ilmu abadi (bebas dari segala kebodohan). Sistem ekonomi Islam mensyaratkan terciptanya ekonomi yang memenuhi kebutuhan semua orang, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, kesempatan kerja yang penuh, setiap individu memiliki hak berdasarkan kontribusinya (kewajiban), tidak ada eksploitasi individu oleh individu lain, dan Pelestarian Lingkungan Alam Ekonomi Islam mensyaratkan semua kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip kesejahteraan, menyeimbangkan aspek dunia dan akhirat.

Tujuan akhir ekonomi islam adalah sebagaimana Motivasi di balik syariat itu sendiri (maqashid puing-puing syari'ah) adalah untuk mencapai kebahagiaan di planet ini dan yang lebih besar melalui permintaan hidup yang layak dan terhormat. Mengakui bantuan pemerintah yang tulus untuk masyarakat adalah premis sekaligus tujuan mendasar dari regulasi Islam (masalah al-ibad), karenanya juga merupakan tujuan dari masalah keuangan Islam. Sesuai As-

Syathibi, tujuan utama dari regulasi Islam adalah untuk mencapai bantuan pemerintah manusia yang terletak pada keamanan lima masalah, khususnya kepercayaan (promosi dien), informasi (al-'ilm), kehidupan (an-nafs), kelimpahan (al--maal) dan keselarasan keturunan (an-nasl). Kelima muslahah pada hakekatnya adalah mengandung makna yang diperlukan untuk berlangsungnya kehidupan yang layak dan adil. Dalam hal salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode perhitungan I-HDI yang diperoleh dari data-data yang memuat angka-angka kemudian hasil dari perhitungannya akan dianalisis untuk mengetahui hasil analisa yang dilakukan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Eksplorasi kuantitatif sendiri merupakan suatu tinjauan yang menggunakan angka-angka baik secara langsung maupun diambil dari hasil pemeriksaan masa lalu dan informasi yang diselesaikan atau ditangani dengan menggunakan penyelidikan terukur. Adapun objek penelitiannya yang diambil dari ketiga provinsi tersebut yaitu data HDI yang meliputi angka kriminalitas, angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelahiran, angka kematian, pengeluaran perkapita, indeks gini serta indeks kemiskinan dan keseluruhan data tersebut diambil melalui data Badan Pusat Statistik yang diperoleh dari situs resmi BPS yaitu www.bps.go.id. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan konsep Maqashid Syariah Index. Dengan terpenuhinya petunjuk-petunjuk yang dapat menjawab lima syarat (agama, jiwa, akal, silsilah dan kekayaan), maka informasi yang didapat dari pemeriksaan ini adalah sebagai informasi kuantitatif yang selanjutnya akan ditempatkan dan ditentukan pada Islamic Human Development Index (I-HDI) di Provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat.dari tahun 2016-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada teori maqashid syariah Imam As-Syathibi bermakna sebagai inti dalam menganalisis fenomena ekonomi dan merumuskan suatu kebijakan. Maqashid syariah sendiri bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan ekonomi. Nilai-nilai maqashid syariah dalam penelitian ini dapat tercermin melalui konsep HDI yang menyangkut tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Sementara pada I-HDI mengusulkan beberapa indikator tambahan yang meliputi angka kriminalitas, indeks gini, indeks kedalaman kemiskinan, angka kelahiran total dan angka kematian bayi. Adapun hasil pencapaian I-HDI menurut konsep maqashid syariah yaitu:

1. Hifzu Ad-dien

Kewajiban dalam menjaga dan memelihara agama tidak dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembangunan manusia. Namun aspek ini juga memiliki peranan yang cukup penting dalam melihat bagaimana kondisi suatu wilayah atau provinsi. Hal ini dapat dilihat dari indikator angka kriminalitas, semakin tinggi angka kriminalitas suatu provinsi maka hal tersebut belum dapat mewujudkan nilai-nilai maqashid yang baik.

Provinsi Aceh memiliki angka kriminalitas yang cukup tinggi dapat dilihat pada tahun 2016 mencapai 9.646 kasus dan menurun pada tahun 2017 hingga 2020 hanya berkisar 7000-8000 kasus. Pada provinsi Bengkulu angka kriminalitas tergolong dalam kategori rendah yaitu 3000-4000 kasus. Pada provinsi Sumatera Barat angka kriminalitas tergolong dalam kategori yang tinggi dilihat pada tahun 2016 mencapai 14.921 kasus dan secara berangsur-angsur angka kriminalitas mengalami penurunan hingga tahun 2020 dengan perolehan kasus 7.992.

2. Hifdz An-nafs

Pentingnya menjaga jiwa dalam pengukuran I-HDI dilihat dengan meningkatnya angka harapan hidup. Semakin tinggi angka hifzu an-nafs maka dapat mencerminkan indeks ini dapat berjalan sesuai dengan konsep maqashid syariah. Dalam pengukuran HDI angka harapan hidup digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan penduduk. Pada ketiga provinsi yang diteliti angka harapan hidup menunjukkan kategori yang sedang, berarti aspek ini sudah berjalan sesuai harapan dari konsep maqashid syariah.

3. Hifdz Al-aql

As-Syathibi mengemukakan bahwa penjagaan terhadap akal merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Penjagaan akal terkait dengan perlindungan akal dari sesuatu yang dapat merusaknya secara fisik maupun non fisik. Indikator yang digunakan dalam konsep I-HDI dalam mengukur indeks hifzu aql dengan melihat angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah maka akan semakin meningkat pula angka pendidikan yang diraih.

4. Hifzu An-nasl

Kewajiban menjaga atau memelihara keturunan berarti menjaga keluarga dari keselamatan di dunia dan akhirat karena inilah tujuan dari penerapan maqashid syariah. Jika HDI hanya berfokus pada pencapaian kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan pokok

berupa kemampuan memenuhi sandang pangan maka dapat disebut pembangunan manusia sudah tercapai. Sementara I-HDI lebih kepada pencapaian dua nilai pokok yang kental dengan pencapaian dunia juga akhirat. Dengan melihat angka kelahiran total dan kematian bayi diharapkan ada upaya pemerintah khususnya dinas kesehatan dalam menanggulangi kematian bayi, khususnya penyebab utama kematian bayi disebabkan oleh keadaan ekonomi masyarakat yang rendah.

Penyebab rendahnya ini disebabkan oleh pengeluaran kebutuhan hidup yang masih tinggi sedangkan pendapatan yang diperoleh belum maksimal. Sehingga berdampak pada kesehatan seorang ibu pada saat hamil belum mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk bayinya tersebut. Adapun faktor lain yang menyebabkan kematian bayi disebabkan karena masih minimnya fasilitas pendukung kesehatan bagi ibu hamil khususnya di daerah terpencil.

Sehingga pentingnya menyediakan fasilitas bagi ibu hamil sesuai dengan konsep maqashid syariah yang menjadi suatu keharusan yang apabila ditiadakan dapat menimbulkan mafsadat bagi keselamatan ibu maupun bayinya pada saat persalinan. Dalam islam memperbanyak keturunan menjadi hal yang sangat dianjurkan maka nilai maqashid syariah yang ingin diangkat adalah dengan banyaknya keturunan yang soleh akan membangun perdaban manusia yang lebih baik dalam segala lini pembangunan.

5. Hifzu Al-maal

Dalam konsep I-HDI hifzu maal, secara umum memiliki beberapa indikator atas kepemilikan harta yaitu pengeluaran perkapita dan pendapatan perkapita. Sedangkan untuk melihat distribusi pendapatan indikator yang digunakan yaitu indeks gini dan indeks kedalaman kemiskinan. Jadi, perbandingan pengukuran I-HDI dan HDI menjadi tolak ukur dalam pembangunan manusia. Antara HDI dan I-HDI membangun konsep yang cukup komperhensif dalam mengukur sesuai kebutuhan masing-masing sesuai dengan perspektif maqashid syariah.

Dengan memperlihatkan hasil dari perhitungan I-HDI yang telah dilakukan, secara garis besar hasil yang didapatkan dengan mengolah data yang ada menunjukkan bahwa kondisi Islamic Human Development Index (I-HDI) di provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat didominasi I-HDI yang rendah. Dapat dilihat dari hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa nilai I-HDI di Aceh pada tahun 2019 mencapai angka 45,4 dan pada tahun 2020 adalah 49,0. Di provinsi Bengkulu angka yang diraih pada tahun 2016 mencapai 44,0 dan pada tahun 2020 diraih angka 50,3. Di provinsi Sumatera Barat

angka I-HDI yang diperoleh pada tahun 2018 diperoleh angka 49,9 dan pada tahun 2020 diperoleh angka sebesar 53,5.

Dari keseluruhan hasil dari pengukuran I-HDI ditiap provinsi yang ada, diperoleh nilai I-HDI yang tergolong status pembangunan I-HDI berkisar dari angka $0 \leq \text{HDI} \leq 59,99$ dan termasuk dalam kategori yang rendah. Ada beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya I-HDI di ketiga provinsi tersebut diantaranya masih tingginya angka kriminalitas yang terjadi, tingkat kemiskinan yang masih belum teratasi secara menyeluruh serta masih tingginya angka kedalaman kemiskinan yang terjadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh MB Hendri Anto dimana dalam penelitiannya ia membahas mengenai Islamic Human Development Index yang dibangun dengan sebuah pengukuran baru tentang pembangunan manusia yang teori dan konsepnya berdasarkan pada perspektif Islam. Pengukuran tersebut dibentuk dari lima dimensi Maqashid Syariah yang kemudian di pakai dalam komponen perhitungan I-HDI, antara lain: angka kriminalitas, tingkat kekerasan, tingkat korupsi, tingkat pendidikan, jumlah lembaga pendidikan agama, tingkat kelahiran dan kematian dan lain sebagainya. Penelitian sebelumnya menjadi dasar rancang bangun konsep dalam menganalisis penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Konsep tersebut peneliti menggunakan sebagai dasar teori dari analisis I-HDI yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia belum terpenuhi secara maksimal dikarenakan hasil dari perhitungan dan analisa diperoleh angka yang masih rendah di ketiga provinsi yaitu Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat. Pembangunan ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya mencapai aspek kesejahteraan yang didasarkan pada lima konsep Maqashid Syariah yaitu memelihara agama (hifz dien), memelihara jiwa (hifz nafs), memelihara akal (hifz aql), memelihara keturunan (hifz nasl) dan memelihara harta (hifz maal).

Hasil penelitian menunjukkan Islamic Human Development Index (I-HDI) di ketiga provinsi tersebut tidak merata. Berarti ada yang salah dengan cara dan sistem kita membangun. Pembangunan yang tidak dilandaskan moral dan etik adalah pembangunan yang hampa seperti halnya yang diungkapkan oleh Abdul Hasan Hadeq pada tahun 2016.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil pengukuran yang dihasilkan dari perhitungan I-HDI mempunyai korelasi perbandingan yang signifikan berdasarkan pada konsep maqashid syariah diantaranya: adanya perbedaan ukuran standar untuk status pembangunan HDI maupun I-HDI, nilai I-HDI lebih bervariasi daripada HDI namun keduanya tetap sama dalam tujuan kemaslahatan, pengukuran yang digunakan juga berbeda karena indikator yang digunakan juga berbeda-beda.
2. Hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan I-HDI di provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat melalui pendekatan maqashid syariah index menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di tiga provinsi tersebut belum berhasil sepenuhnya dan belum dapat menjelaskan keberhasilan pembangunan. Hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh bahwa nilai I-HDI termasuk dalam kategori rendah. Pencapaian terbesar diperoleh melalui angka pendidikan, kesehatan dan tingkat religiusitas masih lebih dominan atau memberi sumbangan yang besar pada pembentukan I-HDI di ketiga provinsi tersebut. Adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan rendahnya nilai I-HDI yaitu masih tingginya nilai indeks gini, angka kedalaman kemiskinan serta angka kriminalitas yang diperoleh sehingga menyebabkan rendahnya I-HDI yang dicapai.
3. Hasil pengukuran I-HDI yang didasarkan pada konsep index maqashid yaitu kesejahteraan daerah diprovinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat diantaranya dapat meningkatkan pembangunan manusia, pendapatan perkapita yang diperoleh semakin meningkat, serta makin tingginya angka pendidikan dan kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa poin yang akan menjadi saran:

1. Pemerintah Provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat harus lebih berkoordinasi terhadap masing-masing wilayah setempat agar dapat mengoptimalkan pembangunan di tiap-tiap wilayah yang ada. Dengan mengoptimalkan pembangunan yang ada maka dapat menciptakan kesejahteraan yang adil dan seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan.
2. Pemerintah Provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Barat mampu dan dapat menerapkan konsep pencapaian pembangunan manusia sesuai konsep I-HDI secara

transparan dan kompeten. Walaupun realisasi yang terjadi belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal, setidaknya ada upaya secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam melanjutkan pembangunan yang ada.

3. Peningkatan aspek kesejahteraan material maupun non material dapat mendorong kesadaran masyarakat, pemerintah maupun negara agar dapat meningkatkan pembangunan manusia guna untuk meningkatkan kesejahteraan material maupun non material yang dihasilkan dari pendapatan perkapita yang tinggi sehingga terciptalah kemaslahatan.

DAFTAR REFERENSI

Al-Quran Terjemahan Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah 2015

LITERATUR

Alimul, Hidayat. *Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Heath Books, 2010.

Ali, Sakti. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*. AQSA Publishing, 2007.

Aulia, Muthiah. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Boedi, Abdullah. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Faturrahman, Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Haqiqi Rafsanjani, *Islamic Human Development Index*, Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2018.

Hendra, Esmara. *Memelihara Momentum Pembangunan, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Gramedia, 1985.

Hess, P and C. Ross. *Economic Development Theories, Evidence and Policies (Terjemahan)*. New York: The Dryden Press, 1997.

Husein, Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis 2nd Ed*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Ika, Yunia dkk. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam : Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

Ismail, Nurdin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Shaabat Cendikia, 2019.

Kuat, Ismanto. *Manajemen Syariah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Mankiw, N. Gregory. *Pengantar Teori Ekonomi Makro, Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

- Meier, M.G. *Leading Issues in Economics Development (Terjemahan), Sixth Edition*. International Edition Finance Series: Mc. Graw Hill, 1995.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi. Edisi Sembilan Jilid I*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Mirakhor, A, dan Askari, H. *Islam Dan Jalan Menuju Pembangunan Manusia Dan Ekonomi Baru*. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
- Muhammad, Mukri. *Aplikasi Konsep Masalah Al-Ghazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. Yogyakarta: Iden Press, 2012.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad, Akram Khan. *Introduction to Islamic Economic*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam, Terjemahan Anas Sidik Dari Judul Aslinya The Economic Enterprise in Islam''*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad Syukuri Albani Nasution Dan Ratna Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana A, 2020)
- Muhammad, Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nur, Feriyanto. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2014.
- Nurul, Huda. *Keuangan Publik Islam, Pendekatan Teoritis Dan Sejarah, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1*. Jakarta: PT Kharisma Putara Utama, 2017.
- Nurul, Huda dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: PT Kharisma Putara Utama, 2017.
- Rahardja Prathama dan Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar Edisi Kelima*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Suharsini Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2010.
- Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Tika, Widiastuti dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021.
- Tim P3EI. *Ekonomi Islam, Cetakan Keempat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Tim P3EI, UII. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jilid 1&2*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Todaro M.P, Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Umer, Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Umer, Chapra. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al Shariah*. Jakarta: IDB, 2008.

JURNAL DAN SKRIPSI

Deddy Cahyadi. “*Analisis Pengukuran Kesejahteraan Di Indonesia*.” Universitas Brawijaya, 2017.

Evi Mutia dan Nastha Musfirah. “*Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara (Maqashid Sharia Index Approach as Performance Measurement of Sharia Banking in Southeast Asia)*” Volume 14 Nomor 2 (Desember 2017)

Hendri Anto MB. “*Introduction an Islamic Human Development Indeks (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries*” Vol. 19 No. 2 (2010).

Nengsih, Titin Agustin. *Analisis Minat Masyarakat Terhadap Baitul Mal Watamwil di Kota Jambi*, Statistika, Vol.13 No.1, 33-38 Mei 2013, hal.34

Nengsih, Titin Agustin, Frederic Bertrand, Myriam Mauny-Bertrand dan Nicolas Meyer. “*Determining the Number of Components in PLS Regression on Incomplete data Set*,” Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology 18, no.6 (18 Desember 2019).

Nengsih, Titin Agustin, Fani Kurniawan, Ahmad Syukron Prasaja, *Analisis Perbandingan Keputusan Membeli di Pasar Tradisional dan Modern*, IJIEB: Vol.6 No.1 June 2021, hal.18

Nengsih, Titin Agustin, Bambang Kurniawan, Eka Fitri Harsanti, *Analisis Keterhubungan Tingkat Kemiskinan dan Pembiayaan Syariah di Indonesia Tahun 2005-2020*. Iltizam Journal of Shariah Economic Research Vol.5 No.2 (2021), hal 225

Nengsih, Titin Agustin, Arsa, Pradita Sari Putri, *Determinan minat menabung masyarakat di Bank Syariah: Studi empiris di Kota Jambi*, Journal of Business and Banking, Vol.11 No.1 Mei 2021, hal.93-111

Nengsih, Titin Agustin, Addiarrahman, AA Miftah dkk (2020). *Pemberdayaan Ekonomi dan Bisnis Muslim Jambi dalam Perspektif Wirausaha Jilid 2: Ahlimedia Press*

Nengsih, Titin Agustin, Fitri Harsanti, Kurniawan, B. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Nengsih, Titin Agustin, Harditya, S. A., Kurniawan, B. (2021). *Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2017-2019* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

- Nengsih, Titin Agustin, Laras, L., Kurniawan, B. (2022). *Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2016-2020* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Nengsih, Titin Agustin, Titik Winarsih, M Subhan, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan Masyarakat di Desa Rantau Kembang Kabupaten Tebo 2018-2020*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.3 No.2 Desember 2022, hal.147
- Nengsih, Titin Agustin, Kurniawan, B., & Adila, S. (2022). *Perspektif Ekonomi Syariah Pada Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi*.
- Nengsih, Abduh dan Ladini, “The Impact of Islamic Financial Development, GDP and Population on Environmental Quality in Indonesia” *International Journal of Economics and Policy*, Vol,13. No.1 (2023)
- Rafsanjani, Haqiqi “Analisis Islamic Human Development Index di Indonesia”. Universitas Airlangga Surabaya, 2014.
- Rukiah. “*Analisis Kontribusi Dan Interaksi Antara Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Fiskal Dan Demografi Terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI) Pada Provinsi-Provinsi Di Indonesia.*” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Sovira, Nurul Fadila. “*Analisis Pengaruh Indeks Kebahagiaan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah.*” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Wulanda Febrizal. “*Pengaruh Islamic Human Development Index dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.*” Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

WEBSITE

aceh.bps.go.id

bengkulu.bps.go.id

sumbar.bps.go.id

www.bps.go.id